

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang terjadi pada BPR XXX terhadap perubahan PTKP pada pegawai mutasi maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Pada saat ada mutasi pegawai yang masih bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasi tempat bekerja saja, maka perhitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar perhitungan selama satu tahun. Tetapi dalam perhitungan tersebut akan memunculkan dua bukti potong.
2. Karena terdapat wajib pajak orang pribadi yang mutasi, maka pegawai tersebut akan mendapatkan dua bukti potong. Bukti potong pertama berisi semua penghasilan yang didapat pada saat bekerja di kantor Mranggen, dan bukti potong kedua berisi semua penghasilan yang didapat pada saat bekerja di kantor cabang.
3. Kenaikan PTKP tersebut menimbulkan pajak terutang yang lebih kecil, sehingga mengakibatkan lebih bayar pajak terutang, kemudian lebih bayar tersebut dapat dikompensasikan atau direstitusi ke masa / tahun berikutnya. Selain itu dampak dari perubahan kenaikan PTKP untuk perhitungan PPh Pasal 21 yaitu BPR XXX harus melakukan pembetulan yaitu dengan cara menghitung ulang potongan PPh Pasal 21 pegawai tetap dari bulan Januari sampai bulan Juni. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kesalahan-

kesalahan pada saat kantor pusat membuat bukti potong supaya saat kantor cabang membuat bukti potong sudah tidak ada kendala lagi.

4. Identifikasi permasalahan terkait dengan administrasi pajak pegawai mutasi terjadi karena adanya *human error* dan keterbatasan pengetahuan perusahaan tentang tata cara perhitungan dan pengisian bukti potong.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemotong PPh Pasal 21

- Pemotong lebih meningkatkan ketelitiannya lagi, jika perlu menambah orang untuk fokus ditugaskan dalam menangani administrasi pajak saja, serta dapat melakukan perbaikan sistem yang lebih baik lagi untuk menekan terjadinya kesalahan akibat ketidak telitian (*human error*) maupun sistem.
- Sebagai pemotong PPh Pasal 21, perusahaan sebaiknya lebih aktif dalam mencari info tentang cara memotong pajak dengan baik dan benar, selain itu perusahaan juga dapat mengadakan pelatihan untuk para pegawai atau para pegawai tersebut dapat mengikuti seminar-seminar untuk menambah wawasan lagi.

### 2. Bagi Penerima Penghasilan PPh Pasal 21

- Sebagai wajib pajak seharusnya kita bisa lebih aktif lagi dalam mencari informasi terbaru tentang perubahan ketentuan dalam

perpajakan. Salah satunya tentang adanya perubahan tentang kenaikan PTKP. Karena perubahan kenaikan PTKP ini bisa berdampak pada karyawan yang mengalami mutasi pada saat adanya perubahan PTKP tersebut. Apabila dalam perubahan PTKP tersebut mengalami lebih bayar, maka lebih bayar tersebut dapat direstitusi atau dikompensasikan.

- Sebagai wajib pajak orang pribadi, apabila anda tidak menerima bukti potong, maka anda berhak meminta bukti potong tersebut ke pemberi kerja. Karena mendapatkan bukti potong merupakan hak bagi wajib pajak.

